



:: PERKUAT PENGAWASAN

Inspektorat Luncurkan Whistle Blower System

YOGYAKARTA – Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta siap meluncurkan Whistle Blower System untuk meningkatkan pengawasan. Sistem tersebut digadang-gadang bisa dimanfaatkan oleh jajaran pegawai pemerintah ikut mengawasi adanya praktik korupsi di sekitarnya.

Dari proses yang berlangsung, ditargetkan peluncuran program tersebut dapat berlangsung di awal Desember mendatang. "Sistem ini bisa diluncurkan pada Desember atau saat peringatan Hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember," kata Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Pembangunan Fisik Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Fitri Paulina di sela sosialisasi pencegahan dan

pemberantasan korupsi di Balai Kota Yogyakarta, kemarin.

Kendati siap diluncurkan, hingga kemarin instrumen pencegahan korupsi tersebut diklaim masih terus difinalisasi. Mulai dari sistem informasi pelaporan hingga upaya perlindungan terhadap pelapor, dan penanganan tindak lanjut laporan yang masih terus disempurnakan.

Dengan keberadaan Whistle Blower, mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemkot menjadi semakin lengkap. Sebelumnya, untuk memfasilitasi masyarakat, disediakan layanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Masyarakat umum bisa menyampaikan keluhan dan informasi secara terbuka

melalui fasilitas tersebut.

"Biasanya, pegawai di lingkungan pemerintah daerah akan merasa takut menyampaikan laporan apabila menemui kejanggalan atau penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Harapannya, dengan adanya Whistle Blower System akan semakin memudahkan pegawai menyampaikan laporan tanpa rasa khawatir," katanya.

Jika berhasil di-launching pada 9 Desember mendatang, Pemkot Yogyakarta tercatat menjadi pemerintah daerah pertama yang memiliki sarana Whistle Blower System. Sebelumnya, fasilitas tersebut baru ada di lembaga kementerian di

pemerintah pusat.

Sarana pengawasan terbaru tersebut rencananya akan terintegrasi dengan sejumlah layanan lain yang sudah ada. "Akan terhubung dengan layanan UPIK, layanan di KPK, maupun di unit kerja presiden tentang pengawasan yakni UKP4," ucap Inspektur Daerah Pemkot Yogyakarta, Wahyu Widayat.

Mengenai upaya pengawasan Pemkot, menurut Wahyu, terus diperkuat. Termasuk praktik gratifikasi yang saat ini telah diatur dengan peraturan wali kota. Tercatat, sudah banyak laporan penerimaan yang berpotensi menjadi gratifikasi dilaporkan jajaran Pemkot ke Inspektorat Daerah.

mahadeva

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005